

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah propinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan di atas merupakan landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan dengan demikian juga dalam Pasal tersebut bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar kecil dan besar, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak, asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) sebagaimana

tercantum di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah BAB IV bagian kedelapan Pasal 57 (1) dan (2) yang berbunyi :

“(1) pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di selenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, (2) komisi pemilihan umum daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah”.

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan seperti ini setidaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menunjukkan eksistensinya dengan bebas mengeluarkan aspirasinya pada tingkat lokal. Disatu sisi hal yang demikian merupakan sebuah strategi demokrasi untuk memudahkan akses partisipasi masyarakat untuk memilih (*participation politic*). Namun disisi lain berbagai problematika bermunculan sebagai bagian dari dinamika politik lokal, hal ini lah yang menjadi tantangan bagi para elite politik daerah bagaimana merespon dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, baik mengatur dan mengelola segala potensi daerah agar lebih baik dan memberikan dampak kemajuan pembangunan yang responsive terhadap kehidupan yang layak dan merata.

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan Kabupaten yang mengikuti pilkada Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2015. Dapat diketahui data pemilih pada pilkada Bupati/Wakil Bupati kabupaten pakpak bharat tahun 2015 yaitu:

“Pemuktahiran data dilakukan terhadap DPS yang berjumlah 33.744 orang pemilih, hasilnya diketahui ada sebanyak 902 orang pemilih harus dicoret dari DPS. Dengan pencoretan tersebut maka data terakhir pemilih Pilkada 2015 kabupaten Pakpak Bharat yang ditetapkan dalam DPT sebanyak 32.842 orang yang terdiri dari laki – laki 16.221 orang dan perempuan 16.621 orang. Tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat adalah hampir 90 persen petani,

sedangkan tingkat pendidikannya mencapai 50 persen lulusan SMA (sekolah menengah atas). http://kpud.kabupaten_pakpak_bharat.html diakses minggu 24 april 2017, pukul 20.09.

Dari data KPU Pakpak Bharat menyebutkan, pasangan nomor urut 1 Remigo Yolando Berutu-Maju Ilyas Padang memperoleh 15.658 suara atau 57,36 persen. Peringkat kedua suara terbanyak ditempati oleh pasangan nomor urut 3 August P Tumanggor-Abdul Kadir Angkat dengan perolehan 11.576 suara (42,41) persen, sedangkan pasangan Jujur Solin-Citra Boangmanalu hanya memperoleh 62 suara atau 0,23 persen. Petugas KPPS di 8 Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat mencatat jumlah seluruh suara di daerah tersebut sebanyak 27.494 suara dengan jumlah suara sah sebanyak 27.296 suara. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 198 suara.

Secara umum, perilaku memilih dalam masyarakat Pakpak Bharat sering kali menafikan pendekatan sosiologisme untuk memilih seseorang yang bisa menjadi pemimpin yang mengayomi. Dalam memilih terbagun atas unsur “kedekatan”, kedekatan dapat dilihat dari banyak sisi, antara lain, kedekatan geografi, kedekatan kekeluargaan, kedekatan emosional melalui pemberian materi atau janji, kedekatan melalui informasi. Dalam hal kekuasaan negara, warga menjatuhkan pilihan pada seseorang bukan berdasarkan rasionalitas. Kemampuan dan rekam jejak seseorang bukan menjadi patokan atau tolak ukur sebelum memilihnya. Hal ini bukan menjadi fenomena di Pakpak Bharat saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Pareto (2012 :66) yaitu:

“Manusia dan khususnya massa, sebagian besar adalah irasional, sebagian besar tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran yang logis, melainkan dari perasaan”. (Dalam jurnal KPU pakpak bharat tahun 2014, diakses 24 april 2017, pukul 20.09)

Perilaku memilih masyarakat dan keterlibatannya pada pemilukada Bupati/Wakil Bupati tahun 2015 Kabupaten Pakpak Bharat tidak memberikan kesan bahwa pilihan psikologis masyarakat dalam memilih pemimpinnya cenderung dikesampingkan. Kecenderungan masyarakat desa kecupak II dalam perilaku memilih, cenderung menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional. Seperti yang dijelaskan asfar (2006) penjelasan tentang perilaku memilih dikenal 3 model pendekatan yaitu :

“pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi dan pendekatan rasional. Faktor-faktor sosiologis misalnya tentang karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya), latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya), sedangkan faktor psikologis mencakup tiga aspek yang merupakan kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Sedangkan pendekatan rasional. Pendekatan ini diadaptasi dari ilmu ekonomi, yaitu analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik), artinya apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional yakni memberikan suara yang dianggap mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian yang sekecil-kecilnya (dalam Nasiwan, 2012:152-153)”.

Dari penjelasan diatas dapat klasifikasikan, bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi dilapangan. Seharusnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat terlaksana dengan baik, tetapi kenyataannya di lapangan sering ditemui pelanggaran, yaitu dengan masih banyaknya politik uang (*money politic*) yang digunakan partai politik sebagai satu strategi jitu yang mengakibatkan masyarakat memilih kandidat dengan melihat kemampuan ekonomi yang diberikan oleh partai politik, kemudian keragaman bentuk nilai dari membagi-bagi sembako, memberi santunan. Selain itu penentuan pilihan masyarakat dalam

pilkada sering di pengaruhi oleh faktor kesamaan suku, agama, marga, faktor keluarga. Bahkan masyarakat ada yang lebih memilih untuk tidak ikut dalam pemilihan atau golput, karena mereka merasa suara yang mereka berikan tidak akan mempengaruhi dan tidak akan memberi dampak apa-apa.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Kecupak II)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka dapat di indentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan masyarakat memilih kandidat
2. Dalam penentuan pilihan masyarakat cenderung memilih menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional.
3. Perilaku memilih dalam pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 di desa Kecupak II

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan juga tidak luas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2005:31) dimana beliau mengatakan bahwa : “Pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti atau mana yang tidak”.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perilaku pemilih dalam pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 di desa Kecupak II

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan uraian terdahulu. Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana perilaku pemilih dalam pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 di desa Kecupak II”?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui perilaku pemilih dalam pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 desa Kecupak II”

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai “perilaku pemilih dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Studi Kasus Di Desa Kecupak II)”
2. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah.

3. Sebagai studi perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama.
4. Menambah khasanah kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.